

Gerakan Sosial Coremap Dalam Pelestarian Terumbu Karang

Nurlindah

Kaharuddin

Universitas Muhammadiyah Makassar
kaharuddin@unismuh.ac.id

Suardi

Universitas Muhammadiyah Makassar
suardi@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Penelitian tentang Gerakan Sosial Coremap dalam Pelestarian Terumbu Karang di Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan masyarakat terhadap Coremap dalam pelestarian terumbu karang dan untuk mengetahui apakah Coremap dapat merehabilitasi dan mengelola terumbu karang yang dapat meningkatkan ekonomi nelayan di Desa Mattiro Bombang. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dari hasil foto dan arsip yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian adalah pertama masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam Coremap, kedua masyarakat nelayan yang dianggap bisa memberikan informasi atau data yang sesuai dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam kegiatan Coremap merasakan dampak yang dialami selama program terlaksana banyak kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Pandangan masyarakat nelayan mengenai Coremap sebagian besar setuju selama diadakannya program tersebut karena menurutnya kondisi ekonomi mereka menjadi meningkat namun sedikit masyarakat menyangkan pemerintah memberhentikan program Coremap.

Kata Kunci : Gerakan Sosial, Coremap, Terumbu Karang.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara bahari yang sekitar 70% dari luas wilayahnya merupakan wilayah perairan, Indonesia dilimpahi dengan potensi sumberdaya laut potensi tersebut sangat beragam jenisnya dan dalam jumlah yang besar. Salah satu sumberdaya laut yang menjadi kekayaan Indonesia adalah terumbu karang yang antara lain berfungsi sebagai tempat hidup berbagai jenis ikan, disamping juga untuk menjaga ekosistem laut dalam arti luas. Kondisi terumbu karang di perairan Indonesia saat ini memperlihatkan karena banyak yang sudah rusak. Berdasarkan hasil pemantauan di 686 lokasi stasiun pantau, secara keseluruhan di Indonesia hanya 5,83% terumbu karang dalam kondisi sangat baik, dan sekitar 22,56 % berada dalam keadaan baik, sisanya sebanyak 36,59% dan 31,92% masing-masing dalam kondisi cukup dan kurang (Suharsono, 2005). Banyak perubahan yang terjadi didalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku dan kebiasaan untuk

meningkatkan taraf dan pola ekonomi dalam keluarga, sehingga kebanyakan masyarakat mengambil kesempatan dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang muncul sifatnya positif, salah satunya perubahan yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki peran ekonomi yang sangat penting karena memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar yang bilamana dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Berbagai faktor berperan dalam menimbulkan kerusakan terumbu karang, baik faktor alam maupun manusia. Beberapa organisme laut yang berperan sebagai predator diantaranya adalah bintang laut. Dari sisi manusia, kegiatan eksploitasi alam tanpa memperhatikan kelestariannya menjadi penyebab utama terjadi kerusakan terumbu karang. Kondisi ini diperparah oleh laju eksploitasi ikan-ikan karang untuk konsumsi dan ikan hias (Coremap, 2009).

Sebagai upaya untuk mengatasi persoalan rusaknya terumbu karang di Indonesia, adalah melalui konservasi dan pengelolaan sumberdaya laut secara berkelanjutan. Untuk itu pemerintah Indonesia dengan bantuan dari beberapa kreditor luar negeri telah mengimplementasikan coremap. Coremap (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) atau Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang adalah program jangka panjang yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta ekosistem terkait di Indonesia, yang pada gilirannya akan menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir.

LANDASAN TEORI

Penelitian yang dilakukan oleh Mita Noveria dkk, (2007) dengan judul Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum kegiatan Coremap dilaksanakan. Gerakan Sosial merupakan salah satu kelompok yang turut memperjuangkan terwujudnya perubahan dunia kearah yang lebih baik. Wood dan Jackson dalam Sztompka, 1994 (dalam Nanang Martono 2011:223) menyatakan bahwa perubahan social merupakan basis yang menentukan ciri-ciri gerakan sosial, dan gerakan sosial berkaitan erat dengan perubahan sosia. Gerakan sosial pada hakikatnya merupakan hasil perilaku kolektif, yaitu sebuah perilaku yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah orang tidak bersifat rutin dan perilaku mereka merupakan hasil tanggapan atau respons

terhadap ransangan tertentu. Akan tetapi, gerakan sosial berbeda dengan perilaku kolektif. Gerakan sosial sifatnya lebih terorganisasi dan lebih memiliki tujuan dan kepentingan bersama dibandingkan perilaku kolektif. Perilaku kolektif dapat terjadi secara spontan, namun gerakan sosial memerlukan sebuah pengorganisasian massa. Sunarto dalam Nanang Martono (2011:223).

Coremap (*Coral Reef Rehabilitation and management program*) atau program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang adalah program jangka panjang yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta ekosistem terkait di Indonesia, yang pada gilirannya akan menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir (KKP Koremap 2001).

Prinsip-prinsip dasar Coremap terdiri atas empat yaitu prinsip pemerataan, amah lingkungan dan lestari, Pengakuan terhadap pengetahuan dan kearifan tradisional, esetaraan jender. Ada empat komponen dasar PBM-COREMAP adalah peningkatan rasa memiliki, pembangunan Kapasitas, konservasi Lingkungan, pengembangan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan. Secara rinci tujuan, PBM-COREMAP adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting kegiatan pengelolaan secara berkesinambungan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam pengembangan program pengelolaan, mendorong masyarakat untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pendapatan pada sumber daya terumbu karang, meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha kecil, baik yang menyangkut pengelolaan keuangan, teknik produksi, maupun aspek pemasarannya. Sasaran pelaksanaan PBM-COREMAP adalah hilangnya tekanan terhadap sumberdaya terumbu karang karena telah membaiknya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan arti penting keberadaan sumber daya terumbu karang, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam lautnya, semakin membaiknya kualitas terumbu karang seiring dengan semakin berkurangnya kegiatan-kegiatan yang bersifat merusak, meningkatnya pendapatan masyarakat melalui usaha pengembangan mata pencaharian alternatif.

Pada dasarnya terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat (CaCO_3) yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu (karang hermatipik) dari filum Cnidaria, ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan zooxantellae, dan sedikit tambahan dari algae berkapur serta organisme lain yang

menyekresi kalsium karbonat (Bengen, 2002). Disamping itu terumbu karang mempunyai nilai penting sebagai pendukung dan penyedia bagi perikanan pantai termasuk didalamnya sebagai penyedia bahan dan tempat budidaya berbagai hasil laut. Terumbu karang juga berfungsi sebagai daerah rekreasi baik rekreasi pantai maupun rekreasi bawah laut. Terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta sebagai tempat perlindungan biota-biota langka. (Suharsono, 1993 dalam Ramli, 2003). Menurut Burke et al (2002) bahwa Terdapat beberapa penyebab kerusakan terumbu karang yaitu : (1) Pembangunan di wilayah pesisir yang tidak dikelola dengan baik; (2) Aktivitas di laut antara lain dari kapal dan pelabuhan termasuk akibat langsung dari pelemparan jangkar kapal; (3) Penebangan hutan dan perubahan tata guna lahan yang menyebabkan peningkatan sedimentasi; (4) Penangkapan ikan secara berlebihan memberikan dampak terhadap keseimbangan yang harmonis di dalam ekosistem terumbu karang; (5) Penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan bom; dan (6) Perubahan iklim global. Kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang disusun berdasarkan prinsip: (1) keseimbangan antara intensitas dan variasi pemanfaatan terumbu karang, (2) pengelolaan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat lokal dan ekonomi nasional, (3) kepastian hukum melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang yang optimal, (4) pengelolaan yang berkeadilan dan berkesinambungan, (5) pendekatan pengelolaan secara kooperatif antar semua pihak terkait, (6) pengelolaan berdasarkan data ilmiah yang tersedia dan kemampuan daya dukung lingkungan, (7) pengakuan hak-hak ulayat dan pranata sosial persekutuan masyarakat adat tentang pengelolaan terumbu karang, dan (8) pengelolaan terumbu karang sesuai dengan semangat otonomi daerah (Kepmen. Kelautan dan Perikanan nomor : 38/ MEN/ 2004).

Kebijakan umum pengelolaan terumbu karang di Indonesia adalah mengelola ekosistem terumbu karang berdasarkan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, serta organisasi non pemerintah. Menurut Westmacott et al (2000) bahwa langkah pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kerusakan terumbu karang adalah dengan memberikan pengertian khusus bagi kebijakan sebagai berikut: (1) Mendirikan zona dilarang memancing dan pembatasan alat perikanan, (2) mempertimbangkan ukuran perlindungan tertentu untuk ikan pemakan alga dan ikan pemakan karang, (3) memberlakukan peraturan yang melarang praktek penangkapan ikan yang merusak, (4)

memonitor komposisi dan ukuran penangkapan, (5) mengembangkan mata pencaharian bagi komunitas nelayan (bila diperlukan), (6) membatasi masuknya nelayan baru ke daerah penangkapan dengan sistem pemberian ijin, dan (7) mengatur pengambilan biota-biota terumbu karang untuk akuarium dan cinderamata. Peningkatan kesadaran masyarakat ditujukan untuk menyakinkan kepada masyarakat pesisir (nelayan), akan manfaat jangka panjang dari perlindungan kawasan terumbu karang, yaitu manfaat berkelanjutan yang dihasilkan oleh usaha perlindungan kawasan pesisir. Karenanya peran serta masyarakat harus dipusatkan pada identifikasi, perancangan dan pelaksanaan berbagai kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari usaha perlindungan kawasan wilayah pesisir (Supriharyono, 2007). Menurut Mitchell et al (2007), usaha konsultasi dengan masyarakat wilayahnya yang terkena kebijakan program dimungkinkan untuk (1) merumuskan persoalan dengan lebih efektif, (2) mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah, (3) merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima, dan (4) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan.

(Westmacott et al, dalam Supriharyono, (2007;76)) mengatakan bahwa tindakan-tindakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan adalah suatu tantangan, dengan banyaknya jumlah orang yang terlibat, banyak diantaranya tanpa sumber pendapatan atau protein alternatif. Banyak komunitas lokal akan memiliki sedikit pilihan mata pencaharian dan kecil kemungkinan untuk beradaptasi dengan kondisi baru ini. Meningkatnya pengertian, kerjasama dan perasaan memiliki dalam komunitas setempat adalah amat penting. Mengembangkan mata pencaharian pilihan bagi komunitas nelayan bila diperlukan.

Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan social ekonomi dengan pendayagunaan sumberdaya terumbu karang secara berkelanjutan. Dengan memberdayakan masyarakat lokal metode rehabilitasi terumbu karang akan berpotensi ekonomi yang berkepanjangan setelah beberapa tahun. Hal ini akan menjadi kenyataan khususnya bila nelayan-nelayan setempat mempunyai mata pencaharian alternatif yang lebih baik dalam pembudidayaan karang dan berpindah dari teknik penangkapan ikan yang merusak. Westmacott et al, 2000 dalam Supriharyono, (2007;79)). Berdasarkan teori mengenai gerakan sosial Menurut Max Weber, memiliki metode yang bisa dipergunakan untuk memahami arti-arti subjektif tindakan sosial seseorang adalah dengan *verstehen*. Istilah ini tidak hanya sekadar merupakan introspeksi

yang cuma bisa digunakan untuk memahami arti subjektif tindakan diri sendiri, bukan tindakan subjektif orang lain. Sebaliknya, apa yang dimaksud Weber dengan *verstehen* adalah kemampuan untuk berempati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berfikir orang lain yang perilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuan-tujuan mau dilihat menurut perspektif. Teori ini menyatakan bahwa akar munculnya gerakan sosial terletak pada perasaan ketidakpuasan. Orang merasa hidupnya nyaman dan puas, cenderung kurang menaruh perhatian pada gerakan social. Ada berbagai ragam ketidakpuasan, mulai dari luapan kemarahan orang-orang yang merasa dikorbankan oleh ketidakadilan yang sampai dengan kadar kejengkelan terendah dari orang-orang yang tidak menyukai perubahan sosial tersebut. Pada semua masyarakat modern, selalu saja terdapat kabar ketidakpuasan yang cukup untuk mendorong terciptanya gerakan sosial. Ketidakpuasan memang merupakan kondisi yang diperlukan dalam proses kelahiran suatu gerakan sosial, akan tetapi kondisi ketidakpuasan itu sendiri belum cukup untuk membangkitkan munculnya gerakan sosial. Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan tempat untuk menyalurkan kegagalan pribadi. Orang yang merasa kecewa dan gagal lebih tertarik untuk ikut serta dalam gerakan social dari pada orang yang sudah merasa puas dan senang. Orang-orang yang merasa bahwa kehidupannya sudah nyaman dan memuaskan kurang memerlukan perasaan harga diri dan keberhasilan karena mereka telah memilikinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami Gerakan Sosial Coremap dalam Pelestarian Terumbu Karang di Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep.. Informan ditentukan secara *purposive sampling* tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan menggunakan tehnik keabsahan data triangulasi sumber, waktu, dan tehnik.

PEMBAHASAN

Coremap merupakan singkatan dalam bahasa inggris yaitu (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) yang artinya program rehabilitasi dan mengelola terumbu karang dengan program jangka panjang yang diperkasai oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan melindungi, merehabilitasi dan mengelola

pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta ekosistem terkait di Indonesia, yang pada gilirannya akan menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebagai salah satu Kabupaten yang terdiri dari tiga unsur kehidupan yaitu pegunungan, daratan, dan kepulauan. Pangkep sudah seharusnya memberikan perhatian mengenai kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah pesisir dan kepulauan agar kehidupan masyarakat nelayan menjadi sejahtera. Adapun bentuk tindakan masyarakat terhadap Coremap dalam melestarikan terumbu karang adalah penjagaan pembatasan wilayah. Penjagaan batas wilayah merupakan salah satu tindakan masyarakat di Desa Mattiro Bombang dalam melestarikan terumbu karang, karena sebelum Coremap diimplementasikan banyak masyarakat dari luar melakukan pengeboman dan pembiusan di desa Mattiro Bombang sehingga masyarakat merasakan dampaknya akibat ulah masyarakat luar yang tidak bertanggung jawab. Setelah Coremap diterapkan, masyarakat sudah melakukan penjagaan batas wilayah agar terumbu karang tidak mengalami kematian akibat penggunaan alat berbahaya seperti penggunaan bom dan pembiusan pada ikan-ikan.

Pembersihan pantai merupakan salah satu rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mattiro Bombang, karena kita ketahui bahwa wilayah perairan Kabupaten Pangkep yang terdiri beberapa pulau yang memiliki potensi Sumber Daya Laut (SDL) yang sangat besar. SDL bagi penduduk di kawasan kepulauan menjadi sumber kehidupan yang paling utama. Sehingga masyarakat melakukan pembersihan pantai satu kali seminggu dan setiap pulau di Desa Mattiro Bombang dalam melakukan pembersihan masyarakat di pimpin langsung oleh kepala dusun untuk melakukan pembersihan pantai. Masyarakat sudah sangat sadar betapa pentingnya terumbu karang di Desa mereka. Sebagian besar masyarakat menyetujui dengan adanya pelarangan buang sampah di laut karena masyarakat menyadari betul betapa pentingnya terumbu karang bagi kehidupan masyarakat di pulau karena terumbu karang memiliki banyak manfaat yang diberikan oleh masyarakat salah satunya mengatasi abrasi pantai dan meredam hantaman gelombang dan ombak. Selain itu pemerintah Kabupaten Pangkep mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya laut yang merupakan peraturan baik yang tertulis maupun tidak. Kebijakan ini dijadikan sebagai peraturan pengelolaan SDL dengan tujuan tercapainya suatu kehidupan yang berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut dan juga masyarakat tetap melakukan tindakan agar terumbu karang agar tetap terjaga karena menurutnya ekosistem

terumbu karang bukan hanya sebagai tempat tinggal ikan dan biota laut, melainkan tempat tinggal mereka agar daerah pesisir dan kepulauan tidak mengalami abrasi dan pengikisan pantai. Tindakan masyarakat terhadap Coremap dalam melestarikan terumbu karang yang dimaksud diatas sangat relevan dengan Menurut Max Weber, metode yang bisa dipergunakan untuk memahami arti-arti subjektif tindakan sosial seseorang adalah dengan *verstehen*. Istilah ini tidak hanya sekadar merupakan intropeksi yang cuma bisa digunakan untuk memahami arti subjektif tindakan diri sendiri, namun tindakan subjektif orang lain. Dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat seperti penjagaan batas wilayah itu merupakan tindakan yang sangat disadari oleh individu atau kelompok masyarakat yang ada di Desa Mattiro Bombang karena penjagaan batas wilayah disetiap pulau memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk menjaga wilayah mereka agar tidak ada lagi masyarakat luar melakukan kejahatan dan pengrusakan terumbu karang yang bisa mengakibatkan kerugian kepada masyarakat nelayan itu sendiri. Yang kedua tindakan masyarakat yaitu pembersihan pantai yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu, pembersihan pantai mendorong masyarakat untuk selalu menjaga pantai dari kontoran sampah yang bisa merusak terumbu karang. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki akan kekayaan sumber daya bawah laut, salah satunya yaitu terumbu karang sehingga harus kita ketahui bahwa fungsi dari pada terumbu karang adalah sebagai tempat berkembang biak dan hidup bagi berbagai jenis ikan laut yang menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Disamping itu, terumbu karang juga memiliki potensi besar bagi wisata bahari dan berperang penting dalam melindungi pantai dan abrasi. Karena itu, apabila ekosistem terumbu karang baik akan menimbulkan dampak positif bagi kehidupan perekonomian masyarakat kepulauan dan pesisir yang menggantungkan kehidupannya dilaut sehingga keberadaan sumber daya terumbu karang sangat diperhatikan untuk kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Sehingga dengan adanya Coremap yang prakasai oleh pemerintah indonesia untuk dijadikan sebagai upaya pencegahan kerusakan terumbu karang dan perbaikan terumbu karang memberikan kepada masyarakat untuk melindungi dan menjaga ekosistem terumbu karang disekitarnya terutama pada masyarakat pesisir dan kepulauan tersebut. Coremap merupakan salah satu program pemerintah yang dapat merahabilitasi dan mengelola terumbu karang dengan lestari, agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Mattiro Bombang. PBM Coremap mempunyai dua komponen yang bisa dijadikan sebagai gerakan sosial yang menjanjikan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan, yang *Pertama* yaitu koservasi lingkungan, *kedua* yaitu perkembangan mata pencaharian

alternatif yang berkelanjutan, kedua ini merupakan komponen yang dapat dijadikan sebagai gerakan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat nelayan. Namun tidak semua masyarakat mengetahui Coremap karena berdasarkan hasil lapangan sipeneliti menemukan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang Coremap bahkan ada juga masyarakat beranggapan bahwa Coremap hanya menimbulkan perpecahan dalam masyarakat karena yang terlibat dalam program Coremap hanya orang-orang tertentu, yang seharusnya yang menjadi pemeran utama dalam kegiatan-kegiatan penyelamatan terumbu karang yaitu masyarakat nelayan bukan masyarakat seperti pegawai negeri, guru sekolah sehingga terjadilah kecemburuan sosial.

KESIMPULAN

1. Adapun tindakan yang dilakukan masyarakat nelayan terhadap Coremap di Desa Mattiro Bombang yaitu masyarakat melakukan penjagaan diperbatasan pulau agar masyarakat luar tidak memasuki wilayah mereka untuk melakukan kerusakan atau pengeboman dan pembiusan, karena apabila masyarakat nelayan diluar sana merusak semauanya maka akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di Desa Mattiro Bombang, masyarakat juga tidak merusak laut dengan tidak membuang sampah organik di laut. Hanya tindak seperti itu yang dilakukan masyarakat setelah Coremap diterapkan karena masyarakat tidak difasilitasi dari pemerintah untuk menjaga terumbu karang secara lanjut.
2. Masyarakat menganggap Coremap dapat merehabilitasi dan mengelola terumbu karang yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan yaitu masyarakat mengatakan hal tersebut karena selama Coremap diterapkan banyak manfaat yang dirasakan, karena Coremap bukan hanya bertujuan mrehabilitasi dan mengelola terumbu karang secara ekologi, namun juga memberkan bantuan kepada masyarakat berupa dana bergulir. Masyarakat nelayan juga diberikan kesempatan untuk ikut sosialisai dalam meningkatkan pengetahuan mereka. Namun masyarakat juga menyayangkan pemerintah memberhentikan Coremap karena banyak anggapan bahwa anggota dari lembaga tidak mamaksimalkan keselenggaraan Coremap.

DAFTAR PUSTAKA

Coremap II. (2006). *Buku Manual Tata Kerja Kelembagaan*. Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan.

- Coremap II. (2007). *Pengenalan Karang Family Merulinidae* Buletin Coremap II.Vol.2, ISSN 1907.7416. Jakarta.
- Dahuri, R., (2003). *Keanekragaman Hayati Laut*, PT. Jakarta .Gramedia Pustaka Utama,
- J. Dwi, Bagong Suyanto. (2006). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*.Jakarta. Prenada Media Group Kencana.
- KKP-Coremap.(2011). Buku Panduan Pelaksanaan PBM Coremap.
- Martono Nanang. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta. Rajawali Pers
- Moleong, J.Lexy. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Posda Karya
- Noveria Mita, dkk. (2007). *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*. Jakarta. Coremap-LIPI.
- Noveria Mita, dkk. (2009). *Implementasi Coremap di Kabupaten Pangkep partisipasi masyarakat dan maanfaat social ekonomi*. Jakarta. Coremap-Lipi
- Sugiono.(2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suparlan Suhartono. (2009). *Filsafat Pendidikan*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Supriharyono.(2007). *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.